



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

m 079

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR DATA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Memanggang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola sistem satu data di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang terintegrasi valid, dan mutakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Daftar Data Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Satu Data di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG DAFTAR DATA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Daftar Data Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

DUA : Daftar Data Kejaksaan ini untuk dipenubi oleh Walidata dan para Produsen Data, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran dan program kerja Kejaksaan *vide* Bab V point B angka 13 dan 14 Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Satu Data di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR DATA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

DAFTAR DATA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

A. Daftar Data Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022

1. Data Wilayah, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- 1.1. Peta dan Luas Wilayah;
- 1.2. Data Pejabat di daerah;
- 1.3. Data Organisasi dan Struktur Pemerintahan Daerah;
- 1.4. Data Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri/;
- 1.5. Data Kabupaten/Kotamadya/Kecamatan/Kelurahan/Desa;
- 1.6. Data Penduduk menurut Jenis Kelamin;
- 1.7. Data Penduduk menurut Agama.

2. Data Bidang Pembinaan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- 2.1. Data Dokumen Tanah dan Bangunan;
- 2.2. Data Pembangunan Gedung Kantor;
- 2.3. Data Perluasan dan Rehabilitasi Gedung Kantor;
- 2.4. Data Rumah Dinas;
- 2.5. Data Kendaraan Operasional, meliputi:
 - 2.5.1. Umum Roda 4;
 - 2.5.2. Umum Roda 2;
 - 2.5.3. Tahanan;
 - 2.5.4. Barang Bukti;
 - 2.5.5. Penyuluhan Hukum;
 - 2.5.6. *Ambulance*;
 - 2.5.7. Jenazah;
 - 2.5.8. *Speed Boat*.
- 2.6. Data Kendaraan Dinas Struktural Roda 4;
- 2.7. Data Peralatan Kantor, meliputi:
 - 2.7.1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, terdiri dari pengolah data (komputer/laptop), komunikasi, dan jaringan;
 - 2.7.2. Peralatan Fasilitas Perkantoran, terdiri dari buku, brankas, meubeler, elektronik, dan perangkat pendukung lainnya;
 - 2.7.3. Peralatan Multimedia;
 - 2.7.4. Peralatan Intelijen;
 - 2.7.5. Alat Pelindung Diri (APD).
- 2.8. Data Keuangan (DIPA, revisi dan realisasi);
- 2.9. Data Hasil Dinas;

- 2.10. Data Pegawai dan Honorer;
 - 2.11. Data Jaksa dan Pejabat Fungsional Lainnya;
 - 2.12. Data Daya dan Jasa;
 - 2.13. Data Aplikasi serta Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
3. Data Bidang Intelijen, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
- 3.1. Data Kegiatan Operasi Intelijen;
 - 3.2. Data Pengawasan Barang Cetak dan Sistem Perbukuan;
 - 3.3. Data Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat;
 - 3.4. Data Kegiatan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM);
 - 3.5. Data Cegah dan Tangkal, Pengawasan Orang Asing dan Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO);
 - 3.6. Data Pengawasan Kegiatan Investasi atau Penanaman Modal;
 - 3.7. Data Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis;
 - 3.8. Data Kegiatan Teknologi Informasi dan Produksi Sarana Intelijen;
 - 3.9. Data Pelaksanaan Kegiatan Tangkap Buronan (TABUR);
 - 3.10. Data Pelaksanaan Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum;
 - 3.11. Data Pos Pengaduan Masyarakat baik langsung atau melalui aplikasi;
 - 3.12. Data Pos Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - 3.13. Data Pengelolaan *Website* dan Media Sosial Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3.14. Peta Politik;
 - 3.15. Peta Ekonomi dan Keuangan;
 - 3.16. Peta Sosial dan Budaya;
 - 3.17. Peta Sasaran Operasi Intelijen;
 - 3.18. Peta Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM);
 - 3.19. Peta Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur/Pemilihan Kepala Daerah.
4. Data Bidang Tindak Pidana Umum, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
- 4.1. Data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - 4.2. Data Pelimpahan Berkas Perkara Tahap I;
 - 4.3. Data Perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21);
 - 4.4. Data Perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) tetapi tidak ditindaklanjuti dengan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti);
 - 4.5. Data Perkara/SPDP yang dikembalikan kepada Penyidik karena tidak ditindaklanjuti;
 - 4.6. Data Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti);
 - 4.7. Data Pemeriksaan Tambahan;
 - 4.8. Data Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Acara Pemeriksaan Biasa (APB)/Acara Pemeriksaan Singkat (APS);
 - 4.9. Data Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Acara Pemeriksaan Cepat (APC);
 - 4.10. Data Tuntutan dan Putusan;

- 4.11. Data Perkara Penting;
 - 4.12. Data perkara pidana umum yang diajukan keadilan restoratif dan yang berhasil dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (terbit SKP2);
 - 4.13. Data Perkara Peradilan Pidana Anak baik selaku pelaku maupun korban (Tuntutan dan Putusan);
 - 4.14. Data Perkara Anak yang diselesaikan melalui Jalur Diversi;
 - 4.15. Data Perkara yang melibatkan Perempuan sebagai Korban (Tuntutan dan Putusan);
 - 4.16. Data Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur/Pemilihan Kepala Daerah;
 - 4.17. Data Perkara Pidana Mati yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan yang telah dieksekusi;
 - 4.18. Data Eksekusi Perkara Pidana Umum;
 - 4.19. Data Upaya Hukum Biasa, Luar Biasa dan Grasi;
 - 4.20. Data Tahanan (Jenis Penahanan dan Penyelesaiannya);
 - 4.21. Data Penyelesaian Barang Bukti;
 - 4.22. Data Eksaminasi.
5. Data Bidang Tindak Pidana Khusus, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
- 5.1. Data Laporan Pengaduan/Kotak Pos 777;
 - 5.2. Data Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - 5.3. Data Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - 5.4. Data Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - 5.5. Data Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - 5.6. Data Kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - 5.7. Data Kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - 5.8. Data Tuntutan dan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - 5.9. Data Tuntutan dan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - 5.10. Data Perkara Penting;
 - 5.11. Data Perkara Tindak Pidana Khusus yang melibatkan Aparat Penegak Hukum;
 - 5.12. Data Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat (Kasus Posisi dan Tahapan);
 - 5.13. Data Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - 5.14. Data Eksekusi Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - 5.15. Data Upaya Hukum;
 - 5.16. Data Tahanan (Jenis dan Penyelesaiannya);
 - 5.17. Data Penyelesaian Barang Bukti;
 - 5.18. Data Kerugian Keuangan Negara yang dapat diselamatkan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - 5.19. Data Kerugian Keuangan Negara yang dapat diselamatkan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - 5.20. Data Eksaminasi.

6. Data Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang setidaknya-tidakunya terdiri dari:
 - 6.1. Data Kegiatan Penegakan Hukum;
 - 6.2. Data Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi;
 - 6.3. Data Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi;
 - 6.4. Data Kegiatan Bantuan Hukum Arbitrase;
 - 6.5. Data Kegiatan Bantuan Hukum Uji Materil;
 - 6.6. Data Kegiatan Pendapat Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 6.7. Data Kegiatan Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 6.8. Data Kegiatan Audit Hukum;
 - 6.9. Data Kegiatan Tindakan Hukum Lainnya;
 - 6.10. Data Kegiatan Pelayanan Hukum;
 - 6.11. Data Upaya Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 6.12. Data Penyelamatan Keuangan Negara;
 - 6.13. Data Pemulihan Keuangan Negara;
 - 6.14. Data *Memorandum of Understanding* (MoU) Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 6.15. Data Perkara Penting.
7. Data Bidang Pidana Militer, yang setidaknya-tidakunya terdiri dari:
 - 7.1. Data Koordinasi Teknis Penuntutan Pidana Militer;
 - 7.2. Data Penanganan Perkara Koneksitas;
 - 7.3. Data Penyidikan Perkara koneksitas;
 - 7.4. Penelitian Hasil Penyidikan;
 - 7.5. Pemeriksaan Tambahan;
 - 7.6. Pemberian Pendapat Hukum Kepada Perwira Penyerah Perkara;
 - 7.7. Penyerahan Perkara;
 - 7.8. Penutupan Perkara;
 - 7.9. Penghentian Penuntutan;
 - 7.10. Penuntutan;
 - 7.11. Perlawanan;
 - 7.12. Upaya Hukum;
 - 7.13. Pelaksanaan Penetapan Hakim;
 - 7.14. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 7.15. Eksaminasi;
 - 7.16. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat;
 - 7.17. Putusan pidana pengawasan;
 - 7.18. Keputusan lepas bersyarat;
 - 7.19. Tindakan hukum lain.
8. Data Bidang Pengawasan, yang setidaknya-tidakunya terdiri dari:
 - 8.1. Data Pelaksanaan Inspeksi Pimpinan;
 - 8.2. Data Pelaksanaan Inspeksi Umum;
 - 8.3. Data Pelaksanaan Klarifikasi dan Inspeksi Kasus;
 - 8.4. Data Pelaksanaan Inspeksi Khusus;
 - 8.5. Data Pelaksanaan Inspeksi Pemantauan;

- 8.6. Data Pelaksanaan Reviu;
 - 8.7. Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat;
 - 8.8. Data Penindakan Pegawai berdasarkan Hukum Disiplin;
 - 8.9. Data Penindakan Pegawai berdasarkan Jenis Perbuatan;
 - 8.10. Data Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 8.11. Data Pelaksanaan Tugas Satgas 53;
 - 8.12. Data Pelaksanaan Tugas Saber Pungli.
9. Data Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejaksaan Republik Indonesia, yang setidaknya terdiri dari:
- 9.1. Data Diklat Teknis Fungsional;
 - 9.2. Data Diklat Manajemen dan Kepemimpinan;
 - 9.3. Data Diklat yang dilaksanakan di Sentra Diklat Daerah;
 - 9.4. Data Diklat yang dilaksanakan dengan bantuan dana donor;
 - 9.5. Data Beasiswa Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktorat (S3).
10. Data lainnya, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
- 10.1. Data Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 10.2. Data Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 10.3. Data Kegiatan Kerjasama Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
 - 10.4. Data Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kejaksaan;
 - 10.5. Data Kegiatan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 10.6. Data Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 10.7. Data Penerapan Sistem Teknologi Informasi Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 10.8. Data Kegiatan Staf Ahli dan Tenaga Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 10.9. Data Kegiatan Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri.
11. Produsen Data untuk masing-masing Data, jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data, klasifikasi keterbukaan atau kerahasiaan Data serta masa retensi Data adalah sebagaimana tercantum dalam format Daftar Data sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan ini.
12. Penyajian Data dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik dalam bentuk:
1. Buku Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia (Buku I, II, III dan IV);
 2. Buku Profil Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Daftar Inventaris Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Telaahan atau Rekomendasi Perencanaan;
 5. Peta Jalan (*Road Map*);
 6. *Dashboard* pada Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan; dan
 7. Bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan perencanaan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

NO	DAFTAR DATA	JUDUL DATA	STRUKTUR DATA	KODE DATA (Diisi oleh Biro Perencanaan)	PERIODE DATA	SUMBER DATA		SIFAT DATA
						KONVENSIONAL (MANUAL)	ELEKTRONIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	DATA BIDANG PIDANA UMUM	Pusat Penerangan Hukum	Kegiatan Intelejen Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelejen	Kontra Penginderaan Latihan Gabungan <i>Adhukesa Command Center</i> <i>Digital Forensic</i>	Setiap Dibutuhkan Setiap Dibutuhkan Setiap Dibutuhkan	Permintaan dari Bidang Terkait		Rahasia
			Penerangan Hukum	Penerangan Hukum	Bulanan	Permintaan dan Kegiatan Rutin		Biasa
			Ukasa Menyapa	Ukasa Menyapa	Bulanan	Permintaan Bidang Terkait		
			Pembuatan Film dan UM	Pembuatan Film dan UM	Bulanan	Kegiatan Rutin		
			Pengelolaan Website	Pengelolaan Website	Bulanan			
			Pengelolaan Media Sosial	Pengelolaan Media Sosial	Bulanan			
			Advertorial	Advertorial	Bulanan			
			<i>Media Gathering</i>	<i>Media Gathering</i>	Bulanan			
			Pengelolaan Podcast	Pengelolaan Podcast	Bulanan			
			Dokumentasi	Dokumentasi	Bulanan			
			Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Bulanan	Permintaan Instansi Pemerintah, BUMN atau Pihak Swasta		
			Kerjasama antar instansi Pemerintah / swasta dan Lembaga terkait	Kerjasama antar instansi Pemerintah / swasta dan Lembaga terkait	Bulanan			
			Pra Penuntutan	Pra Penuntutan	Bulanan			Penting
			Data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan					
			Data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang tidak diikuti Tahap I					
			Data Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P17)					
			Data Perkarra Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik					
			Data Berkas Perkarra yang tidak kembali setelah diberi petunjuk (P18/P19)					
			Data Surat Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis (P20)					
			Data yang dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan					
			Data Pra Peradilan					
			Data Pelimpahan Berkas Perkarra Tahap I					
			Data Pelimpahan Berkas Perkarra Tahap I yang tidak Kembali ke Jaksa P-15					
			Data perkarra yang Sudah Dinyatakan Lengkap (P-21)					
			Data Perkarra yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) tetapi tidak ditindaklanjuti dengan tahap II					
			Data pengembangan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Berkas Perkarra					
			Data Pemenuhan Petunjuk yang melebihi waktu yang telah ditentukan					
			Data Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Berkas Perkarra (tidak diserahkan)					

NO	DAFTAR DATA	JUDUL DATA	STRUKTUR DATA	KODE DATA (Dihari oleh Biro Perencanaan)	PERIODE DATA	SUMBER DATA		SIFAT DATA
						KONVENSIONAL (MANUAL)	ELEKTRONIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	DATA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan Kibodot/Indikator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Perkara Tidak Pidana HAN Berat		Bulanan	-	Elektronik	Rahasia
			Tahap Pra Penyiapan		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Tahap Penyidikan		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Tahap Pra Penuntutan		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Tahap Eksekusi		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Penaksanaan Focus Group		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Disarision, Timbangan Teknik, dan Sosialisasi		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Pemantauan dan Evaluasi		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Penanganan Perkara		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Data Upaya Hukum		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Data Penyelamatan Kerugian Negara		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
			Data Penertamaan Negara Zukar Patak (PNBP)		Bulanan	-	Elektronik	Biasa
5	DATA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan Kibodot/Indikator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatkan Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Peningkatan dan Pervaseasian Perkara Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Pemberian Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Pembantuan Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Peningkatan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
5	DATA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan Kibodot/Indikator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Penelitian Keuangan Negara		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Kesejahteraan Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
5	DATA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan Kibodot/Indikator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kesejahteraan Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
			Kesejahteraan Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang		Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Manual	Elektronik	Rutin/ Biasa
5	DATA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan Kibodot/Indikator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jumlah Laporan/Peringatan Yang Merupakan Tindakan		Tahunan	3 (tiga) manual	-	Biasa
			Jumlah Laporan/Peringatan Yang Merupakan Tindakan		Tahunan	3 (tiga) manual	-	Biasa

NO	DAFTAR DATA	JURKL DATA	STRUKTUR DATA	KODE DATA (Diusi oleh Biro Perencanaan)	PERIODE DATA	SUMBER DATA		SIFAT DATA				
						KONVENSIONAL (MANUAL)	ELEKTRONIK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
7	DATA BIDANG PENGAWASAN	Data Koordinasi Teknis Peningkatan Perantara Data Penanganan Perkara Koneksitas	Jumlah Koordinasi Teknis Penindakan	Tahunan	Surat masuk	-	-	Biasa				
			Jumlah Koordinasi Teknis Penuntutan						Tahunan	Surat masuk	-	Biasa
			Jumlah Koordinasi Teknis Sekresi UPWA Hukum Luar Negeri dan Eksaminasi						Tahunan	Surat masuk	-	Biasa
			Jumlah Penanganan Perkara Koneksitas						Tahunan	Surat masuk	-	Biasa
			Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Tiap Inspektorat						Bulanan	-	Melalui Aplikasi Data E-Sading	Biasa
			Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia						Bulanan	-	-	Biasa
			Data Penulatan Hukuman Disiplin						Bulanan	-	-	Biasa
			Data Klarifikasi dan Inspeksi Kasus Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia						Bulanan	-	-	Biasa
			Data Inspeksi Umum di Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia						Bulanan	-	-	Biasa
			Data Inspeksi Khusus di Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia						Bulanan	-	-	Biasa
8	DATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Fendukung dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	Tahunan	Manual	-	-	Biasa				
			Pendidikan dan Pelatihan Prioritas Nasional						Tahunan	Manual	-	Biasa
			Pendidikan dan Pelatihan Non Prioritas Nasional						Tahunan	Manual	-	Biasa
			Dikat Teknis Administrasi Kelaksaaan						Tahunan	Manual	-	Biasa
			Pelatihan Dasar Colongan II dan III						Tahunan	Manual	-	Biasa
			Pelatihan						Tahunan	Manual	-	Biasa
			Pelatihan Kepemimpinan Administrator						Tahunan	Manual	-	Biasa
			Pendidikan dan Pelatihan <i>Management Of Training (MOT)</i>						Tahunan	Manual	-	Biasa
			Pendidikan dan Pelatihan <i>Training Of Course (TOC)</i>						Tahunan	Manual	-	Biasa
			Pendidikan dan Pelatihan untuk Kebutuhan di Wilayah <i>Restorative Justice</i>						Tahunan	Manual	-	Biasa
Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di Sentra Diklat Pendidikan dan Pelatihan Barutan Dana Donor	Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di Sentra Diklat Pendidikan dan Pelatihan Barutan Dana Donor	Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di Sentra Diklat Pendidikan dan Pelatihan Barutan Dana Donor	LOM Pengembangan Program Platform Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman <i>Knowledge Sharing Platform</i>	Tahunan	Manual	-	Elektronik	Biasa				
			<i>Training of Trainer</i> Peradilan yang Fair bagi Penyanggah Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum	Tahunan	Manual	-	Elektronik	Biasa				
			USDOJ - OPDAT	Tahunan	Manual	-	Elektronik	Biasa				
			USDOJ - UNODC	Tahunan	Manual	-	Elektronik	Biasa				
			UGM	Tahunan	Manual	-	Elektronik	Biasa				
			Data Beasiswa Pendidikan Mangster (S2)	UNDIP	Tahunan	Manual	-	Elektronik	Biasa			

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN